

TAJUK RENCANA

Sosialisasi Sistem Poin Lalu Lintas

KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberlakukan sistem pengurangan poin bagi pelanggar lalu lintas. Dalam satu tahun, Surat Izin Mengemudi (SIM) memiliki 12 poin. Jika melakukan pelanggaran ringan, dikurangi 1 poin, pelanggaran sedang 3 poin dan pelanggaran berat 5 poin. Bila terjadi kecelakaan hingga korban meninggal dikurangi 12 poin. Sedang jika tabrak lari SIM langsung dicabut. Jika 12 poin habis, maka SIM diblokir dan saat perpanjangan harus mengulang. Sistem poin ini dinamakan Traffic Activity Report dengan menggunakan sistem nilai keputusan berkendara atau merit point system (KR6/1). Ketentuan ini mulai diberlakukan tahun 2025.

Kita meyakini sistem poin ini tujuannya baik, yakni agar tercipta ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Sistem poin ini akan menjadi data keselamatan dalam berlalu lintas di jalan dengan parameter pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya sistem poin maka akan dapat dengan mudah diketahui data akumulatif seluruh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan seseorang dalam setahun. Data ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Polri khususnya Korlantas untuk melakukan berbagai pembenahan, baik terkait dengan sistem maupun penegakan aturan (law enforcement).

Di sisi lain, kita juga meyakini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perihal sistem poin ini. Misalnya, apa saja yang masuk kategori pelanggaran ringan sehingga poinnya dikurangi 1. Begitu pula untuk kategori pelanggaran sedang yang poinnya akan dikurangi 3, begitu pula untuk pelanggaran berat. Sekadar catatan, pelanggaran ringan (poinnya dikurangi 1) antara lain tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak menyalakan lampu sein saat belok, tidak membawa SIM atau STNK, berkendara sambil menggunakan HP, melanggar batas kecepatan sedikit di atas aturan.

Sedang pelanggaran sedang (poin dikurangi 3) antara lain melanggar marka jalan seperti menerobos garis stop di lampu merah, tidak memberi jalan kepada pejalan kaki di zebra cross, mengemudi kendaraan yang tidak layak, misal lampu rem mati, melawan arus lalu lintas di jalan tertentu, serta melebihi batas kecepatan secara signifikan dan sebagainya. Kita yakin untuk jenis-jenis pelanggaran ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.

Kita memahami bahwa dalam penegakan hukum atau aturan berlaku adagium atau prinsip semua orang dianggap tahu hukum, walaupun dalam kenyataannya tidak semua tahu hukum. Bila prinsip ini tidak diberlakukan, maka ketika orang melakukan pelanggaran, ia akan mengatakan tidak tahu hukumnya dengan harapan terbebas dari sanksi. Logislah bila semua orang dianggap tahu hukum, yang artinya orang tidak tahu hukum sekalipun, tetap dianggap tahu hukum, sehingga aturan itu dapat diterapkan.

Termasuk terkait pemberlakuan sistem poin dalam pelanggaran lalu lintas, semua orang dianggap tahu aturannya. Namun kita perlu mengingatkan perihal kekuatan berlaku aturan tersebut. Hendaknya aturan tersebut (sistem poin) tak hanya berlaku secara yuridis, tapi juga sosiologis, yakni aturan itu diterima dan mengikat masyarakat. Karenanya, agar memiliki kekuatan sosiologis, kita mendorong pemerintah dalam hal ini Polri untuk intens melakukan sosialisasi tentang pemberlakuan sistem poin, apalagi ini berlaku secara nasional.

Bahkan, sistem poin ini juga tidak menghilangkan atau menghapus denda tilang yang selama ini diberlakukan. Sistem poin dan tilang adalah dua mekanisme sanksi yang berbeda, yang pertama merujuk pada pencatatan pelanggaran secara kumulatif, dan yang kedua mengarah pada sanksi finansial untuk pelanggaran yang dilakukan. □ - d

Makan Siang Gratis vs Subsidiaritas

PROGRAM makan siang bergizi gratis yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendapat tanggapan pro dan kontra. Menurut rencana, program prioritas ini dimulai 6 Januari 2025.

Saat kampanye Pilpres lalu, calon presiden Prabowo memprediksi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 460 triliun. Dalam pembentukan RAPBN 2025, program makan siang gratis dialokasikan anggaran Rp 71 triliun. Sejatinnya, program ini memiliki tujuan mulia, yakni memenuhi kebutuhan gizi sekaligus memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Banyak kalangan menengarai, program makan bergizi gratis ini berpotensi menimbulkan masalah. Salah satu indikasinya ialah kebimbangan pemerintah dalam penetapan besaran anggaran per porsi.

Awalnya anggaran sebesar Rp 15.000 per porsi. Namun, setelah melakukan uji coba di pulau Jawa selama 11 bulan, pemerintah akhirnya menetapkan angka rata-rata Rp 10.000 per porsi. Cukupkah angka sekecil itu untuk menyediakan makanan bergizi?

Akan tetapi, masalah program makan gratis tak sekadar soal besaran atau potensi keborcoran anggaran. Program makan siang bergizi gratis yang secara teoretis luhur ini dalam praktiknya rawan mencederai prinsip subsidiaritas.

Prinsip Subsidiaritas

Banyak orang keliru menyamakan subsidiaritas dengan subsidi. Padahal, dua hal ini memiliki makna yang berbeda. Subsidi adalah bantuan yang lazimnya diberikan pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau pengurangan pajak guna meringankan beban masyarakat.

Sementara itu, subsidiaritas memiliki makna mendalam. Subsidiaritas berakar pada kata Latin *subsidiarius* yang berarti cadangan. Subsidiaritas menekankan bahwa inisiatif harus diprakarsai oleh tingkat serendah mungkin, kecuali jika inisiatif dari tingkat yang lebih tinggi memberikan keuntungan (Malan, 2012).

Dalam filsafat dan moral sosial, subsidiaritas berarti lembaga atau aktor yang lebih kuat tidak boleh mengambil alih urusan satuan sosial yang lebih kecil, sejauh satuan sosial tersebut masih mampu mengusahakan sendiri.



puan aktual kelompok warga yang hendak dibantu untuk memenuhi keperluan mereka sendiri.

Tidak semua kelompok warga sungguh memerlukan makan bergizi gratis. Di sejumlah tempat, perbaikan gedung sekolah lebih mendesak. Di tempat lain, edukasi gizi lebih tepat sasaran karena sebenarnya ada sumber pangan lokal, namun selama ini kurang dimanfaatkan warga.

Penyaluran bantuan anggaran makan bergizi seharusnya menyesuaikan dengan kemampuan setiap sekolah dan wilayah dalam mengupayakan makanan bergizi secara (semi) mandiri. Tidak boleh dipukul rata dengan perhitungan anggaran per porsi menurut pemerintah saja. Apalagi sebagai upaya ditetapkan sebagai program serentak nasional, padahal sebenarnya tidak semua daerah memerlukan bantuan yang sama.

Penerapan prinsip subsidiaritas sekaligus dapat mencegah rakyat menjadi sasaran politisasi bantuan sosial (bansos) yang marak terjadi untuk mempengaruhi rakyat dalam pemilihan umum. Makan bergizi gratis pun bisa disalahgunakan oknum *wong licik* sebagai upaya meninabobokan rakyat dengan serba memanjakan, tanpa memberdayakan *wong cilik*.

Rakyat seharusnya diakui martabat dan upayanya. Rakyat tidak boleh hanya dijadikan lumbung suara dengan diujani aneka bantuan sosial, termasuk makan siang gratis.

Rakyat perlu mendengarkan dan dilibatkan dalam perancangan dan pelaksanaan program pemerintah. Semoga! (*)-d

**Dr Bobby Steven, Dosen Universitas Sanata Dharma.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Bersekolah yang Membahagiakan

LIBUR sekolah waktu yang sangat dinantikan oleh anak-anak. Saat libur tiba, suasana hati anak-anak begitu gembira, seperti yang tercermin dalam lagu Libur Telah Tiba yang dinyanyikan oleh Tasya. Lirik lagu ini menggambarkan kegembiraan yang dirasakan oleh banyak anak Indonesia setiap kali libur sekolah datang. Namun, kenyataannya adalah setelah libur berakhir, kembali ke sekolah tidak selalu menyenangkan bagi semua anak.

Enggan Berangkat Sekolah

Pada hari pertama masuk sekolah setelah libur semester, penulis mendapati beberapa anak merasa enggan untuk berangkat sekolah. Alasan yang diungkapkan sederhana; "Ah, tidak asyik, sekolah tidak asyik, liburan kok cepat banget." Hal ini menggambarkan fenomena umum yang sering terjadi pada banyak pelajar di Indonesia, di mana anak merasa tidak nyaman untuk kembali ke sekolah setelah masa liburan.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pelajar di Kota Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan, banyak anak yang merasa enggan kembali bersekolah setelah liburan semester. Ini adalah masalah yang cukup besar yang perlu diperhatikan oleh pihak sekolah dan guru. Kenapa hal ini bisa terjadi?

Pertama, sekolah belum menjadi tempat yang menyenangkan bagi banyak anak-anak. Masih ada banyak siswa yang merasa tidak nyaman di sekolah, baik secara fisik maupun emosional. Banyak sekolah yang belum dapat menciptakan suasana yang ramah dan menyenangkan bagi para siswa.

Kasus 'Bullying'

Kedua, masih tingginya kasus *bullying* atau perundungan di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, menjadi salah satu penyebab ketidaknyamanan siswa di sekolah. *Bullying* yang terjadi tidak selalu dapat ditangani dengan baik oleh pihak sekolah, dan ini menyebabkan siswa merasa takut atau tidak aman di lingkungan sekolah.

Ketiga, banyak guru yang belum mampu menjadi teladan atau idola bagi siswa. Guru seharusnya dapat menginspirasi dan memberi contoh yang baik bagi

Yuzarion

anak-anak. Namun, tidak semua guru memiliki kemampuan tersebut. Padahal, peran guru sebagai pembimbing dan contoh sangat penting dalam perkembangan siswa.

Keempat, beban tugas sekolah yang terlalu banyak juga menjadi faktor yang membuat siswa merasa tidak betah di sekolah. Tugas-tugas yang diberikan, baik di sekolah maupun pekerjaan rumah, yang harusnya sangat banyak. Beban akademik yang tinggi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental siswa.

Cari Solusi

Sekolah harus mencari solusi untuk masalah ini agar bisa menjadi tempat yang menyenangkan dan membahagiakan bagi siswa. Psikologi pembelajaran taqwa menawarkan; Solusi pertama adalah dengan memperkuat peran guru, yang harus menjadi teladan yang baik bagi siswa. Nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh bapak pendidikan Indonesia, KH Agus Salim, seperti *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani* harus menjadi prinsip dasar bagi setiap guru.

Solusi kedua menangani kasus *bullying* dengan tegas. Pihak sekolah perlu menjamin bahwa kasus *bullying* tidak akan dibiarkan begitu saja, dan ada langkah-langkah yang jelas untuk mengatasi masalah ini. Dengan cara ini, siswa dapat merasa lebih aman dan nyaman di sekolah.

Solusi ketiga adalah memperkuat karakter guru. Karakter yang baik harus ditanamkan dalam diri guru dan ditunjukkan melalui tindakan nyata. Sebagai contoh, karakter "jujur" bukan hanya diajarkan secara teori, tetapi juga harus tercermin dalam perbuatan dan perilaku sehari-hari para guru.

Keempat, pihak sekolah

perlu mengevaluasi tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Tugas sekolah, terutama yang berbentuk pekerjaan rumah, harus diperhatikan dengan baik agar tidak membebani siswa. Sekolah perlu memastikan bahwa tugas-tugas tersebut sesuai dengan kebutuhan psikologis siswa, tidak membuat siswa merasa tertekan, dan mendukung kesejahteraan akademik siswa.

Terakhir, sekolah perlu melibatkan psikolog profesional untuk memperkuat layanan psikologis di sekolah. Psikolog dapat membantu menangani masalah psikologis yang dihadapi oleh siswa, baik itu terkait dengan belajar maupun interaksi sosial di sekolah. Dengan adanya layanan psikologis yang baik, siswa dapat lebih mudah mengatasi masalah siswa dan merasa lebih nyaman di lingkungan sekolah.

Semoga dengan adanya perubahan dan upaya yang lebih baik dalam menciptakan suasana yang membahagiakan di sekolah, para siswa di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, dapat merasakan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan dan penuh kebahagiaan, *èsekolahku surgaku!*, seperti yang diinginkan oleh banyak anak-anak Indonesia. ***-d

**JDr Yuzarion Sag SPsi MSi, Dosen Senior Psikologi Taqwa UAD Yogyakarta.*

Pojok KR

Korlantas berlakukan sistem poin bagi pelanggar.

- Perlu survei, banyak yang belum tahu.

Ketua DPD usul wacanakan capres independen.

- Sayangnya peran parpol masih dominan.

Pedagang Teras Malioboro 2 segera direlokasi.

- Lebih nyaman, dagangan laris manis...

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK-MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.